

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini telah lama diakui sebagai tulang punggung ekonomi nasional, yang tidak hanya berfungsi sebagai mesin pertumbuhan, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan pencipta lapangan kerja.

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM Di Indonesia

Tahun	Mikro, Kecil, Menengah (Dalam Jutaan)
2020	64,2
2021	65,4
2022	65
2023	65,5
2024	66

Sumber: Statista (2025)

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai angka yang sangat masif, yaitu 64,2 juta unit usaha, dengan kontribusi yang luar biasa besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% (Statista, 2025). Lebih jauh, UMKM menampung sebagian besar angkatan kerja nasional, dengan persentase penyerapan mencapai 97% dari total tenaga kerja, yang mencerminkan perannya yang tak tergantikan dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan (Kredit Usaha Rakyat, 2020). Peran strategis ini menjadikan UMKM sebagai fondasi penting yang memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi, terutama dalam menghadapi gejolak makroekonomi (Junaidi, 2024).

Namun, di balik narasi keberhasilan tersebut, sektor UMKM dihadapkan pada serangkaian tantangan struktural yang serius dan saling terkait, yang menghambat potensi penuh mereka untuk tumbuh dan berkelanjutan. Salah satu masalah paling mendasar adalah isu informalitas. Banyak pelaku UMKM, terutama di skala mikro, beroperasi di luar sistem formal tanpa izin usaha, pencatatan keuangan yang sistematis, atau kepatuhan pajak. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan, termasuk data yang tidak akurat dan tersebar di berbagai Lembaga seperti yang diakui dalam data Kementerian Koperasi dan UKM dan menciptakan ekonomi bayangan yang tidak dilaporkan (SUSILO, 2022). Ekonomi bayangan ini, yang menurut riset Bank Dunia dapat mencapai 21-26% dari PDB Indonesia, tidak hanya dari pengukuran ekonomi, tetapi juga merugikan negara dengan potensi kehilangan pendapatan pajak hingga Rp 200 triliun per tahun. Lebih jauh, informalitas menjebak para pelaku usaha dalam siklus produktivitas rendah dan ketidakamanan, di mana pekerja seringkali tidak memiliki kontrak, jaminan sosial, atau perlindungan yang memadai. (Goh, 2025) (PUTRI, 2022)

Ketersediaan dan kemampuan akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan jasa keuangan formal secara terjangkau dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, indeks inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 92,74 persen (KEMENTERIAN, 2025), mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk telah memiliki akses terhadap layanan keuangan. Akselerasi inklusi ini didorong sebagai langkah strategis untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi hingga ke daerah pelosok. Implementasinya dioptimalkan melalui peran Tim Percepatan Akses Pembiayaan Daerah (TPAKD) yang bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong program penyaluran kredit/pembiayaan, seperti Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan fasilitasi pembiayaan kepada UMKM oleh lembaga jasa keuangan (misalnya bank syariah dan *fintech P2P lending*). Melalui program-program ini, inklusi keuangan berfungsi sebagai motor penggerak untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, mendukung pengembangan sektor unggulan daerah, dan membantu program pengentasan kemiskinan. Salah satu konsekuensi langsung dari informalitas ini adalah terbatasnya akses UMKM terhadap pembiayaan formal dari lembaga perbankan konvensional. Tanpa rekam

jejak keuangan yang terstruktur dan legalitas usaha, banyak UMKM dianggap (Wahida, 2025) *unbankable* atau tidak layak untuk mendapatkan kredit, yang pada akhirnya membatasi kemampuan mereka untuk melakukan ekspansi dan inovasi. Menurut laporan Bank Indonesia, hanya sekitar 30% usaha mikro dan kecil yang memiliki akses ke kredit formal. (Goh, 2025) Penelitian ini memfokuskan studi pada UMKM di wilayah Tangerang Raya, yang memiliki karakteristik unik. Wilayah ini mencakup Kota Tangerang Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan. Perekonomian Tangerang Selatan (Tangsel).

Di tengah tantangan ini, perkembangan teknologi finansial atau *fintech* muncul sebagai angin segar yang menawarkan solusi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan *fintech* sebagai inovasi pada sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi modern untuk menyediakan layanan yang lebih efisien, praktis, dan inklusif. Adopsi *fintech*, melalui berbagai bentuknya seperti dompet digital, sistem pembayaran Di tengah tantangan ini, perkembangan teknologi finansial atau *fintech* muncul sebagai angin segar yang menawarkan solusi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan *fintech* sebagai inovasi pada sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi modern untuk menyediakan layanan yang lebih efisien, praktis, dan inklusif. Adopsi *fintech*, melalui berbagai bentuknya seperti dompet digital, sistem pembayaran *fintech lending* karena kemudahan dan kecepatannya. (Fitriani & Mansur Chadi Mursid, 2025; Tahun, 2025)

Tabel 1. 2 Perkembangan *fintech* untuk UMKM

Tahun	Perkembangan <i>fintech</i>	
	Jutaan USD	Persentase Kenaikan
2021	63	-
2022	76	20%
2023	80	6%
2024	90	13%

Sumber: *fintech* Indonesia (2025)

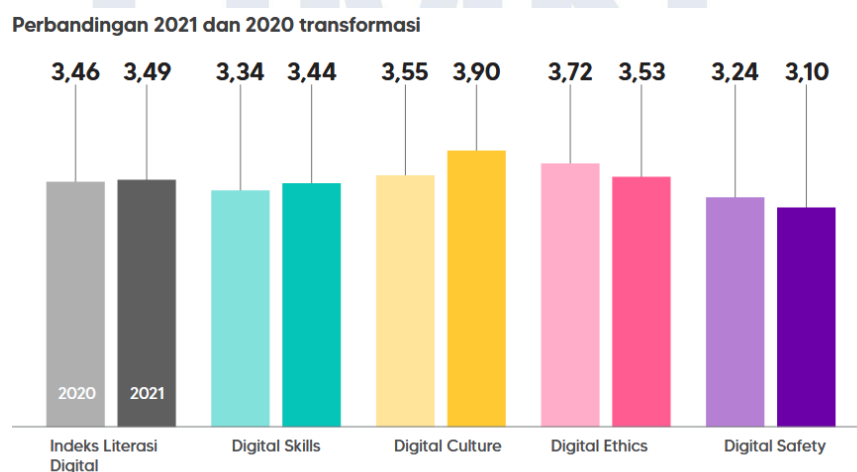
Namun, adopsi *fintech* ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada faktor internal dari pelaku UMKM itu sendiri, terutama literasi keuangan. Menurut OJK, literasi keuangan adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi perilaku seseorang dalam mengelola keuangannya untuk mencapai kesejahteraan. Fenomena yang sering terjadi adalah rendahnya tingkat literasi digital dan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM, yang menjadi hambatan besar dalam proses digitalisasi dan adopsi *fintech*.

Tabel 1. 3 Perbandingan Literasi Digital antara Negara

Literasi Digital Negara	Persentase
Indonesia	62%
Korea	97%
Asean Rata-rata	70%

Sumber: CNBC Indonesia TV (2023)

Tanpa pemahaman yang memadai tentang produk-produk keuangan, risiko, dan manfaat teknologi, pelaku UMKM sulit untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dan memanfaatkan *fintech* secara optimal.



Gambar 1. 1 Status Literasi Digital di Indonesia

Sumber: Kominfo (2021)

Secara umum, terjadi peningkatan skor di semua pilar indeks transformasi digital dari tahun 2020 ke tahun 2021. Peningkatan terbesar tercatat pada pilar Digital Culture, yang melonjak dari 3,55 menjadi 3,90. Meskipun semua pilar menunjukkan perbaikan, pilar Digital Safety memiliki skor terendah, baik pada tahun 2020 (3,24) maupun 2021 (3,10). Hal ini mengindikasikan bahwa keamanan digital menjadi aspek yang paling lemah dan perlu perhatian serius dalam upaya transformasi digital. Beberapa penelitian bahkan mengindikasikan bahwa rendahnya literasi keuangan adalah hambatan utama bagi UMKM untuk mengakses layanan *fintech peer-to-peer lending*. Sebaliknya, studi lain menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan berkorelasi positif dengan peningkatan inklusi keuangan, yang pada gilirannya mendukung daya saing dan kinerja usaha. (Kurniadi & Ihsan, 2025; Putri Sutikno et al., 2024)

Tabel 1. 4 UMKM Tutup sementara atau Bangkrut

Tahun	Indikator	Jumlah UMKM dalam Jutaan
2020	Tutup Sementara	31,1
	Bangkrut	26,4
2021	Tutup Sementara	12,8
	Bangkrut	5,6

Sumber: BPS (2020) dan Liputan6 (2021)

dapat diketahui bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya pada periode tahun 2020 hingga 2021. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah UMKM yang mengalami tutup sementara mencapai 31,1 juta unit, sementara UMKM yang mengalami bangkrut tercatat sebesar 26,4 juta unit. Tingginya jumlah UMKM yang terdampak pada tahun 2020 mencerminkan kondisi perekonomian nasional yang mengalami kontraksi akibat pembatasan aktivitas ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, serta terganggunya rantai pasok dan distribusi.

Selanjutnya, pada tahun 2021 terlihat adanya penurunan jumlah UMKM yang terdampak dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah UMKM yang mengalami tutup sementara menurun menjadi 12,8 juta unit, sedangkan UMKM yang mengalami bangkrut tercatat sebesar 5,6 juta unit. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya proses pemulihan ekonomi secara bertahap, seiring dengan pelanggaran pembatasan aktivitas masyarakat, adaptasi pelaku UMKM terhadap teknologi digital, serta berbagai program pemulihan ekonomi nasional yang diluncurkan oleh pemerintah.

Meskipun demikian, data tersebut juga menunjukkan bahwa dampak pandemi terhadap UMKM tidak dapat diabaikan sepenuhnya. Masih adanya UMKM yang tutup sementara maupun bangkrut pada tahun 2021 menandakan bahwa sebagian pelaku usaha menghadapi keterbatasan modal, lemahnya literasi keuangan, serta kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal. Oleh karena itu, kondisi ini mempertegas pentingnya dukungan kebijakan yang berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan literasi keuangan dan akses UMKM terhadap layanan keuangan, termasuk pembiayaan berbasis teknologi finansial (fintech).

Kawasan Tangerang Raya yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan memiliki struktur perekonomian yang sangat beragam dan dinamis, menjadikannya salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jabodetabek. Sektor usaha utamanya didominasi oleh Industri Pengolahan, terutama di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, yang didukung oleh keberadaan banyak kawasan industri. Selain itu, Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga merupakan kontributor utama, didorong oleh populasi yang besar dan daya beli masyarakat yang tinggi. Sektor jasa berkembang pesat, khususnya di Kota Tangerang Selatan yang menonjol dengan jasa keuangan, properti, jasa konsultasi, dan jasa-jasa lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Secara umum, sektor Konstruksi menunjukkan pertumbuhan signifikan di seluruh wilayah, sejalan dengan maraknya pembangunan properti (perumahan, kawasan industri, dan komersial) serta infrastruktur, sementara transportasi dan pergudangan serta informasi dan

komunikasi juga menjadi sektor basis yang kuat, mencerminkan peran strategis wilayah ini sebagai penghubung dan pusat logistik. Meskipun kontribusinya lebih kecil, sektor-sektor seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga ada dan terus dikembangkan untuk mendukung keragaman ekonomi daerah. Menurut (Yanto, 2025) perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Tangerang menunjukkan lonjakan signifikan dari 25.000 pada tahun 2022 dan terus meningkat hingga mencapai 61.000 unit saat ini, sedangkan Menurut (Mico, 2024) ada sekitar 92.783 unit, rata-rata usaha mikro kecil, di Kota Tangerang Selatan, dan berdasarkan Pemerintah Kota Tangerang terdapat 58.692 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) merujuk pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat yang memadai dalam mengelola serta memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 66,64% (Pradhana, 2025), angka ini masih menunjukkan adanya kesenjangan signifikan jika dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan. Tantangan utama dalam peningkatan literasi berfokus pada kualitas pemahaman masyarakat, khususnya terkait produk di sektor non-bank seperti asuransi, pasar modal, dan *fintech*, yang indeks literasinya jauh tertinggal dari perbankan. Oleh karena itu, upaya pemerintah dan regulator difokuskan pada penguatan literasi melalui edukasi yang lebih intensif, terarah pada segmen prioritas seperti pelaku UMKM dan perempuan, serta pencegahan terhadap investasi dan pinjaman ilegal demi meningkatkan ketahanan finansial.

Meskipun demikian, pelaku usaha di Tangerang Raya menghadapi tantangan spesifik, seperti konsistensi dan kualitas produk di era digital, serta kendala permodalan, di mana sebagian besar UMKM tidak mendapatkan modal dari bank dan sering menghadapi masalah kurangnya pengetahuan manajemen. Pemerintah setempat telah merespons tantangan ini dengan berbagai program proaktif. Pemerintah Kabupaten Tangerang meluncurkan program untuk

memfasilitasi legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). Kehadiran program-program ini menjadikan Tangerang sebagai studi kasus yang ideal untuk meneliti efektivitas intervensi kebijakan. (Dian Erika Nugraheny, 2025)

Keterkaitan antara ketiga variabel literasi keuangan, adopsi *fintech*, dan akses pembiayaan menjadi sangat menarik dan kompleks. Adopsi *fintech* dapat membuka akses ke pembiayaan, tetapi akses ini menjadi efektif hanya jika pelaku UMKM memiliki literasi keuangan yang memadai untuk mengelola dana tersebut dengan bijak. Sebagai contoh, sebuah studi menemukan bahwa adopsi *fintech* tidak serta-merta berpengaruh signifikan terhadap Keberlanjutan Bisnis mikro, terutama karena adanya persepsi risiko yang berlebihan di kalangan pelaku usaha. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya literasi keuangan sebagai variabel yang memediasi hubungan antara adopsi teknologi dan Kinerja Bisnis.

Kompleksitas hubungan antar variabel tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan krusial. Analisis yang mendalam terhadap keterkaitan antara Literasi Keuangan, Adopsi *fintech*, dan Akses Pembiayaan terhadap Kinerja dan Keberlanjutan Bisnis UMKM akan memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana ekosistem ini bekerja di Indonesia. Dengan menganalisis fenomena ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan rekomendasi strategis bagi pemerintah, praktisi, dan akademisi untuk memberdayakan UMKM. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah ekosistem yang tidak hanya mendorong pertumbuhan kuantitas, tetapi juga meningkatkan kualitas, daya saing, dan Keberlanjutan Bisnis di era ekonomi digital.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Adopsi *fintech*?
2. Apakah Adopsi *fintech* berpengaruh positif terhadap Akses Pembiayaan?
3. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Akses Pembiayaan?
4. Apakah Akses Pembiayaan memediasi hubungan antara Adopsi *fintech* dan Kinerja Bisnis?

5. Apakah Akses Pembiayaan berpengaruh positif terhadap Kinerja Bisnis?
6. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Bisnis?
7. Apakah Kinerja Bisnis berpengaruh positif terhadap Keberlanjutan Bisnis?
8. Apakah Akses Pembiayaan memediasi hubungan antara Literasi Keuangan dan Kinerja Bisnis?
9. Apakah Adopsi *fintech* dan Akses Pembiayaan memediasi hubungan antara Literasi Keuangan dan Kinerja Bisnis?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan membuktikan pengaruh Literasi Keuangan secara positif terhadap Adopsi *fintech*.
2. Menganalisis dan membuktikan pengaruh Adopsi *fintech* secara positif terhadap Akses Pembiayaan.
3. Menganalisis dan membuktikan pengaruh Literasi Keuangan secara positif terhadap Akses Pembiayaan.
4. Menganalisis peran mediasi Akses Pembiayaan dalam hubungan antara Adopsi *fintech* dan Kinerja Bisnis.
5. Menganalisis dan membuktikan pengaruh Akses Pembiayaan secara positif terhadap Kinerja Bisnis.
6. Menganalisis dan membuktikan pengaruh Literasi Keuangan secara positif terhadap Kinerja Bisnis.
7. Menganalisis dan membuktikan pengaruh Kinerja Bisnis secara positif dan signifikan terhadap Keberlanjutan Bisnis.
8. Menganalisis peran mediasi Akses Pembiayaan dalam hubungan antara Literasi Keuangan dan Kinerja Bisnis.
9. Menganalisis peran mediasi Adopsi *fintech* dan Akses Pembiayaan dalam hubungan antara Literasi Keuangan dan Kinerja Bisnis.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan di bidang manajemen bisnis dan ekonomi pembangunan, khususnya terkait peran faktor-faktor non-finansial dalam pengembangan UMKM. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai topik serupa.

1. Bagi Pelaku UMKM: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya peningkatan literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi finansial untuk mendorong pertumbuhan dan Keberlanjutan Bisnis.
2. Bagi Pemerintah Daerah: Hasil analisis akan menyajikan data dan evaluasi empiris mengenai efektivitas program pemberdayaan UMKM yang telah berjalan. Hal ini dapat menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih strategis dan tepat sasaran di masa mendatang, khususnya di wilayah Tangerang Raya.
3. Bagi Lembaga Keuangan: Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang kesiapan UMKM dalam mengelola pinjaman. Dengan demikian, lembaga keuangan dapat merancang produk pembiayaan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat meningkatkan inklusi keuangan.
4. Bagi Peneliti: Penelitian ini akan memberikan pengalaman praktis kepada peneliti dalam menerapkan teori yang telah dipelajari, sekaligus meningkatkan keterampilan dalam melakukan analisis data, menulis, dan menyajikan laporan penelitian ilmiah.
5. Bagi Universitas: Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber data empiris yang valid bagi pengembangan ilmu manajemen dan ekonomi di universitas. Kontribusi ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi universitas sebagai lembaga pendidikan yang aktif dalam berkontribusi pada solusi permasalahan ekonomi dan bisnis di masyarakat.

1.5 Batasan Penelitian

1. Variabel Penelitian: Penelitian ini hanya berfokus pada variabel-variabel yang tercantum dalam model konseptual, yaitu Literasi Keuangan, *Adopsifintech*, Akses Pembiayaan, Kinerja Bisnis UMKM, dan Keberlanjutan Bisnis UMKM.
2. Lokasi Penelitian: Studi kasus ini secara spesifik dilakukan pada pelaku UMKM yang beroperasi di wilayah Tangerang, yang mencakup Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
3. Metode Penelitian: Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi landasan teori dari variabel-variabel penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan, dan perumusan hipotesis berdasarkan model konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, jenis data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan untuk mengolah data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan hasil dari analisis data, menginterpretasikan temuan, dan membahas implikasi dari hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi ringkasan dari seluruh hasil penelitian, merumuskan kesimpulan, dan memberikan saran praktis serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

